

**TINJAUAN FIKIH SIYASAH TERHADAP PENENTUAN LOKASI**

**PEMBANGUNAN IBU KOTA NEGARA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Kevin Lucky Pradhana Putra**

**NIM. 05040420067**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kevin Lucky Pradhana Putra

NIM : 05040420067

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Tata Negara

Judul : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penentuan Lokasi Pembangunan Ibu Kota Negara

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Januari 2024

Saya yang menyatakan,

  
Kevin Lucky Pradhana Putra

NIM. 05040420067

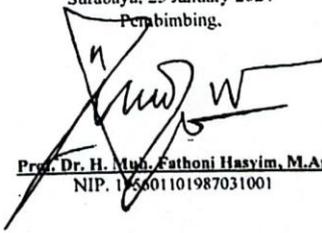
## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Kevin Lucky Pradhana Putra  
NIM : 05040420067  
Judul : Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penentuan  
Lokasi Pembangunan Ibu Kota Negara

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 25 January 2024  
Pembimbing.

  
Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag  
NIP. 195601101987031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

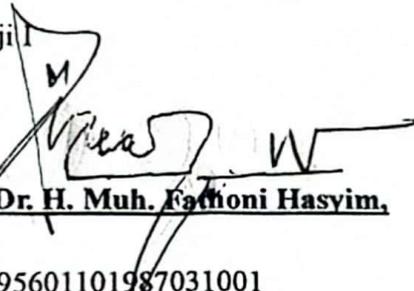
Nama : Kevin. Lucky

NIM. : 050404020067

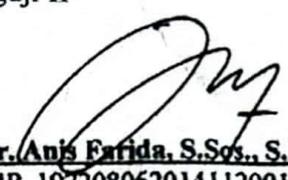
Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

  
Prof. Dr. H. Muh. Rahnani Hasyim,  
M.Ag  
NIP. 195601101987031001

Penguji II

  
Dr. Anis Farida, S.Sos., S.H., M.Si  
NIP. 197208062014112001

Penguji III

  
Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H  
NIP. 198905172015031006

Penguji IV

  
Moh. Bagus, M.H  
NIP. 19951105202203100

Surabaya, 31 Mei 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,  
  
Dr. Hj. Saadiyah Musafa'ah, M.Ag.  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Kevin. Lucky. PradhanaPutra  
NIM : 05040420067  
Fakultas/Jurusan : Hukum Tata Negara  
E-mail address : gallagherk006@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul : Tinjauan Fikih Siyash Terhadap Penentuan Lokasi Pembangunan Ibu Kota Negara

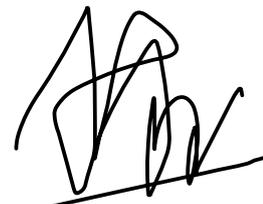
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

  
(Kevin Lucky PradhanaPutra)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Fikih Siyasah Terhadap Penentuan Lokasi Pembangunan Ibu Kota Negara”, merupakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana tinjauan yuridis terhadap pemindahan Ibu Kota Negara menurut UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kedua, bagaimana tinjauan fikih siyasah dusturiyah terhadap pemindahan ibu kotanegara.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan Bahan hukum primer berupa konstitusi khususnya pasal yang menyebutkan tentang ibu kota negara dalam pasal 2 dan pasal 23 huruf g UU No.3 Tahun 2022 dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Bahan hukum sekunder yaitu semua referensi yang memuat kajian tentang penentuan lokasi pembangunan ibu kota negara.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama pemindahan ibu kota negara ke Penajam Paser di Kalimantan Timur adalah konstitusional, meskipun tidak ada pasal tertentu yang secara tegas mengatur mengenai kedudukan ibu kota negara. Dasar pemindahan IKN adalah pidato kenegaraan presiden pada tanggal 16 Agustus 2019. Pidato kenegaraan merupakan konvensi yang sumber hukumnya adalah hukum tata negara, di mana dalam substansi pidato tersebut berisikan RPJM 2020-2024 tentang pemindahan ibu kota negara. Berdasarkan pasal 18 huruf f UU No 12 Tahun 2011 maka RPJM dapat dijadikan landasan dalam perancangan UU, dalam hal ini UU No 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Kedua, dalam pemindahan IKN ke Kalimantan timur dilihat dari perspektif fikih siyasah dusturiyah, tidak ada aturan khusus mengenai penempatan atau pemindahan IKN sebagai basis pemerintahan. Namun masalah IKN merupakan masalah ijtihadiyah yang diserahkan pada khalifah. Madinah al Munawaroh merupakan ibu kota pertama dalam peradaban Islam. Pemindahan ibu kota negara berpindah dari Madinah ke Damaskus Suriah, pada masa Khalifah Mu’awiyah bin Abu Sofyan.

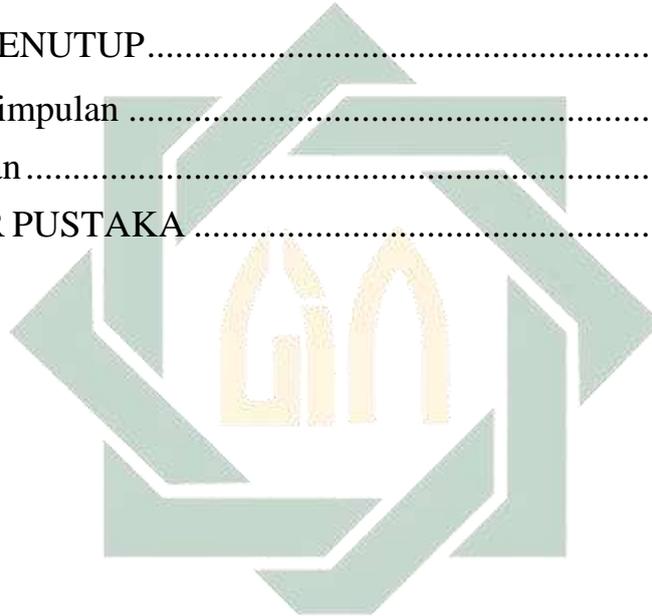
Pemindahan Ibu Kota Negara diatur dalam UU IKN sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara kurang adanya pengawasan dari sisi legalisasi tanah yang akhirnya banyak mafia tanah yang memperjual belikan tanah tanpa adanya sertifikat dan kejelasan dari tanah tersebut, sehingga menuai banyak kritik dari berbagai pihak yang berpendapat bahwa pemerintah kurang tegas dalam hal pengawasan pembangunan IKN di KALTIM. Kemudian pemerintah juga harus memperhatikan kesejahteraan penduduk lokal, jangan sampai ketika IKN sudah diresmikan kesejahteraan penduduk lokal tergeser oleh kepentingan negara.

**Kata Kunci:** *Fikih Siyasah, IKN, Penentuan Lokasi Pembangunan IKN*

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II .....	18
PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA (IKN).....	18
A. Pemindahan IKN dalam Pemerintahan Islam .....	18
B. Pemindahan IKN Indonesia .....	27
C. Masa Konstitusi Indonesia Serikat .....	35
BAB III .....	38
KALIMANTAN TIMUR SEBAGAI IBU KOTA NEGARA INDONESIA.....	38

A. Deskripsi Kondisi Kontemporer Jakarta Dan Penajem Paser	38
B. Pertimbangan Pemilihan KALTIM Sebagai IKN Baru.....	42
C. Pemindahan IKN Dalam Pertimbangan Pemerintah.....	44
BAB IV .....	47
ANALISIS FIKIH TERHADAP PEMILIHAN LOKASI IKN.....	47
A. Analisis Pertimbangan Pemerintah Tentang KALTIM Sebagai IKN Indonesia.....	47
B. Analisis Fikih Siyasah Tentang Pemilihan KALTIM Sebagai IKN .....	56
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Ecky Agassi, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu kota Negara*”, (Skripsi S-1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013)
- H. M Yahya, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat)*, (Universitas Merdeka Malang, 2018)
- Scott Campbell, *The Enduring Importance of National Capital Cities in the Global Era (Working Paper: Urban and Regional Planning Program)*, (College of Architecture and Urban Planning University of Michigan, 2003),
- Ecky Agassi, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu kota Negara*”, (Skripsi S-1) Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor, 2013.
- Denys Reva “*Capital City Relocation and National Security: The Cases Of Nigeria And Kazakhstan*,” Mini- Dissertation Master Of Secutity Studies (MSS), Department of Political Sciences University Of Pretoria Faculty Of Humanities, 2016
- Sutikno, *Perpindahan Ibu Kota Negara Suatu Keharusan Atau Wacana (Pusat Studi Bencana)*, (Universitas Gadjah Mada, 2007)
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- H. M Yahya, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera (Jurnal Studi Agama dan Masyarakat)*, (Universitas Merdeka Malang, 2018)
- Deden Rukmana, *Pemindahan Ibu kota Negara* (Artikel Asisten profesor dan koordinator program studi perencanaan dan studi perkotaan di Savannah State University, AS.
- H. M Yahya, *Pemindahan Ibu Kota Negara Maju dan Sejahtera* Ecky Agassi, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pemiindahan Ibu kota Negara*”, (Skripsi S-1 Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: UI Presss, 1990), 15.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 20) Institut Pertanian Bogor, 2013)

- Suryadi Jaya Purnama, Chotib, *“Analisis Kebijakan Publik Pemindahan Ibu Kota Negara”*, Jurnal Ekonomi dan kebijakan, Vol. 13, No. 2, 2022, h. 154. 153-168.
- Wesley Liano Hutasoit, *“Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara”* Dalam jurnal dedikasi Indroharto, *“Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik” dalam Paulus Efendie*
- Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994)
- Suryadi Jaya Purnama dan Chotib/*Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol. 13, No. 2, 2022, h. 154. 153-168.
- Humad dan Protokol BPHN, BPHN: *“Draf Naskah Akademik RUU Ibu Kota Negara Masuk Tahapan Penyelarasan”*  
Drajat Tri Kartono, Hanif Nurcholis, *“Konsep dan Teori Pembangunan”*, Modul Pembangunan Masyarakat Desa dan Kota (Universitas Terbuka, 2016)
- JDIH Kemenko Maves, *“Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara* dalam <https://jdih.maritim.go.id/id/undang-undang-nomor-3-tahun-2022-tentang-ibu-kotanegara>, diakses pada 30 Juni 2022.
- Arsil, F. (2022). *Problematika Regulasi UU Ibu Kota Negara” Gagasan Memperkuat Checks and Balances dan Partisipasi Publik dalam “Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?”* PT Publica Indonesia Utama.
- Mauleny, AT. (2022b). *Skema Pembiayaan/ Pendanaan IKN Nusantara dalam “Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?”* PT Publica Indonesia Utama.
- Amos, J (2020, April 23), Kalimantan Timur: Ilmuwan temukan risiko tsunami dekat calon ibu kota baru Indonesia. Diperoleh tanggal 10 September 2022.
- Bappenas. 2019. *“Kajian Konsolidasi”* Penentuan Lokasi Pemindahan Ibu Kota Negara  
Arsil, F. (2022). *Problematika Regulasi UU Ibu Kota Negara: Gagasan Memperkuat Checks and Balances dan Partisipasi Publik dalam “Ibu Kota Nusantara: Strategi Menuju Indonesia Baru?”* PT Publica Indonesia Utama
- Suryadi Jaya Purnama dan Chotib/*Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* Vol. 13, No. 2, 2022, h. 154. 153-168.  
<https://djp.kemenkeu.go.id>

- Ibarahim, “*Korelasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibukota Negara Terhadap Perlunya Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 bagi Masyarakat Betawi*”, INDEPENDEN : Jurnal Politik Indonesia dan Global
- JDIH Kemenko Maves, “*Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara*” dalam <https://jdih.maritim.go.id/id/undang-undang-nomor-3-tahun-2022-tentang-ibu-kota-negara>
- Fanisa Luthfia Putri Erwati, Waluyo, “*Catatan Kritis Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang IBU Kota Negara Serta Implikasi Hukum yang Ditimbulkan*” Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional
- Aufa Salsabila dan Nunung Nurwati, Deforasi dan Migrasi Penduduk Ke Ibu Kota Baru Kalimantan Timur: Peran Sinergis Pemerintah Dan Masyarakat” *Peran Sinergis Pemerintah Dan Masyarakat*”, Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat
- Hutasoit, W. L. (2018). Analisa Pemandangan Ibukota Negara. DEDIKASI: *Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 19(2), 108–128
- Herdiana, D. (2022). Pemandangan Ibukota Negara: *Upaya Pemerataan Pembangunan ataukah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik*. *Jurnal Transformative*, 8(1), 1–30.
- Tata Wijayanta, “*Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*” dalam *Jurnal Dinamika Hukum* Vol., 14 No., h. 219
- KHAIR, O. I. (2022). *Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara*. *ACADEMIA: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1), 1–10

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A